



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah untuk satu tahun kedepan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bangka Tengah tahun 2023, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis pemerintah daerah.

Selain itu, renja ini juga disusun dengan berpedoman pada RKPD (Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah) tahun 2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Bupati Bangka Tengah.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renja termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renja Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Periode Tahun 2023.

Koba, Juli 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



Drs. IRWAN, M.Tr.I.P

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP. 19681128 198810 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I. PENDAHULUAN

 I.1. Latar Belakang 1

 I.2. Landasan Hukum 3

 I.3. Maksud dan Tujuan 4

 I.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra
 Perangkat Daerah 6

 II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

 II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 21

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 24

BAB V. PENUTUP 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja PerubahanPerubahan (RENJA-Perubahan) Tahun 2023mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA Perubahan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut,RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakanPembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA Perubahan didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA Perubahan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD Perubahan dan

RENJA Perubahan SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah adalah aparat pemerintah di bidang ketertiban umum di daerah serta penegakan peraturan daerah dengan wilayah kerja yang mencakup 6 (enam) Kecamatan antara lain: Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk besar, Kecamatan Namang, Kecamatan pangkalan Baru, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Sungai Selan. Dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas dan permasalahan yang sangat beragam, Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah menjabarkan tugas rutin Tahun 2023 dalam Rencana Kerja PerubahanPerubahan Tahun 2023.

Rencana Kerja PerubahanPerubahan Satpol PP Tahun 2023 ini mencakup program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan terinci, juga mencakup kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang memadai yang kesemuanya dibiayai melalui dana APBD Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan tugasnya dengan berbasis kinerja, sehingga ketertiban umum dan penegakan Peraturan daerah di wilayah Bangka Tengah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Renja Satpol PP Tahun 2023 ini akan senantiasa mengacu kepada substansi yang tertuang dalam dokumen Renstra, baik yang berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran hingga kebijakan, program dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan SKPD) adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada Lampiran Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 - 050/264A/SJ, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa ” Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD “.
9. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022.

1.3. Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah ini adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antaran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
5. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah ini adalah :

1. Sebagai media informasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam memberikan arah atau gambaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
2. Untuk Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023;
3. Agar tersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun lalu (2022)
 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

**BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
 PERANGKAT DAERAH**

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu (2022) Dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

RencanaKerjaPerubahanSatuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Bangka Tengah adalahpenjabaranperencanaantahunan dan RencanaStrategisSatuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Bangka Tengah. Tercapaitidaknyapelaksanaankegiatan-kegiatanatau program yang telahdisusun. Pada Bab ini memuat review Evaluasi pelaksanaan renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun Berjalan. Adapaun **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah s.d 2022** dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

| No | SASARAN | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output) | Target Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra SKPD) | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (Tahun 2021) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%) | | Unit OPD Penanggung Jawab |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 12 = 8+9+10 | | 13 = 12/7 x 100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5 x 100 | | 16 |
| | | | | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| I | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | 100 | % | 79.520.513.838 | 100 | 11.271.967.932 | 100 | 10.412.854.038 | 95 | 9.862.941.514 | 95 | 95 | 195 | 21.134.909.446 | 194,72 | 26,58 | SATPOL |
| I | Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya | 100 | % | 23.623.229.010 | 100 | 3.999.698.606 | 100 | 3.944.440.210 | 91 | 3.601.964.732 | 91 | 91 | 191 | 7.601.663.338 | 191,32 | 32,18 | SATPOL |
| 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | 100 | % | 339.000.000 | 100 | 51.434.450 | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 51.434.450 | 100,00 | 15,17 | SATPOL |
| 1 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang disusun | 25 | dokumen | 232.000.000 | 5 | 38.154.500 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 38.154.500 | 20,00 | 16,45 | SATPOL |
| 2 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun | 25 | dokumen | 107.000.000 | 5 | 13.279.950 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 13.279.950 | 20,00 | 12,41 | SATPOL |
| 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP | 100 | SAP | 16.408.575.800 | 100 | 2.698.938.587 | 100 | 3.284.627.000 | 90 | 2.961.548.167 | 90 | 90 | 190 | 5.660.486.754 | 190,16 | 34,50 | SATPOL |
| 1 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | bulan | 18.579.678.918 | 56 | 2.686.808.887 | 12 | 3.284.627.000 | 12 | 2.961.548.167 | 100 | 90 | 68 | 5.648.357.054 | 113,33 | 30,40 | SATPOL |
| 2 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan yang disusun | 5 | laporan | 72.000.000 | 5 | 9.180.000 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 9.180.000 | 100,00 | 12,75 | SATPOL |
| 3 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan yang disusun | 5 | laporan | 52.000.000 | 5 | 2.949.700 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 2.949.700 | 100,00 | 5,67 | SATPOL |

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------|--------|-------|--------|
| | | SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | AdministrasiKegawaiPerangkat Daerah | PersentasekapadadministrasikegawaiPerangkat Daerah | 100 | % | 854.000.000 | - | - | 100 | 34.000.000 | 76 | 25.900.490 | 76 | 76 | 76 | 25.900.490 | 76,18 | 3,03 | SATPOL |
| 1 | | Pendidikan dan PelatihanPegawaiBerdasarkanTugas dan Fungsi | jumlahpeserta yang mengikuti diklat formal | 50 | orang/kegiatan | 820.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | SATPOL |
| 2 | | PengadaanPakaianDinasBesertaAtributKelengkapannya | JumlahPaketPakaia nDinasBesertaAtributKelengkapannya | 1 | Paket | 820.000.000 | - | - | 1 | 9.000.000 | 1 | 7.571.000 | 84 | 84 | 1 | 7.571.000 | 84,12 | 0,92 | SATPOL |
| 3 | | Bimbingan Teknis ImplementasiOeraturanPerundang-undangan | Jumlah Orang yang mengikutiBimbingan Teknis ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan | 164 | orang | 820.000.000 | - | - | 5 | 25.000.000 | 4 | 18.329.490 | 73 | 73 | 4 | 18.329.490 | 2,24 | 2,24 | SATPOL |
| 4 | | AdministrasiUmumPerangkat Daerah | Persentasekapadnelayanadminis trasiumum | 100 | % | 1.400.470.000 | 100 | 176.041.950 | 100 | 172.200.000 | 100 | 171.897.563 | 100 | 100 | 200 | 347.939.513 | 199,82 | 24,84 | SATPOL |
| 1 | | PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor | Jumlahbulanpelayan anjasakomunikasi, sumberdaya air, dan listrik | 60 | bulan | 29.630.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 100 | 100 | 24 | 6.000.000 | 40,00 | 20,25 | SATPOL |
| 2 | | PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlahbulanpelayan anpenyediaanalatulis kantor | 60 | bulan | 205.040.000 | 12 | 24.000.000 | 12 | 18.000.000 | 12 | 18.000.000 | 100 | 100 | 24 | 42.000.000 | 40,00 | 20,48 | SATPOL |
| 2 | | PenyediaanBahanLogistik Kantor | Jumlahbulanpelayan anpenyediaanmakan an dan minuman | 60 | bulan | 208.000.000 | 12 | 31.968.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 14.772.000 | 98 | 98 | 24 | 46.740.000 | 39,70 | 22,47 | SATPOL |
| 4 | | PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan | Jumlahbulantersedia nyabarangcetakan dan penggandaan | 60 | bulan | 94.200.000 | 12 | 13.746.900 | 12 | 10.000.000 | 12 | 9.999.850 | 100 | 100 | 24 | 23.746.750 | 40,00 | 25,21 | SATPOL |
| 5 | | Penyediaanbahanbacaan dan peraturanperundang-undangan | Jumlahbulanpenyedi aanbahanbacaan dan peraturanperundang - undangan | 60 | bulan | 23.800.000 | 12 | 3.546.000 | 12 | 1.200.000 | 12 | 1.176.500 | 98 | 98 | 24 | 4.722.500 | 39,61 | 19,84 | SATPOL |
| 6 | | PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlahrapatkoordinasi dan konsultasikeluardaer ah yang dilaksanakan | 2 | Laporan | 839.800.000 | 2 | 99.781.050 | 2 | 125.000.000 | 2 | 124.949.213 | 100 | 100 | 4 | 224.730.263 | 199,96 | 26,76 | SATPOL |
| 5 | | PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah | Persentasekapadnpengadaanbarang milikdaerahpenunh jangurusanpemerin tahdaerah | 100 | % | 1.931.141.000 | 100 | 5.000.000 | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 5.000.000 | 100,00 | 0,26 | SATPOL |
| 1 | | PengadaanPeralatan dan MesinLainnya | jumlahpengadaanpe ratatangedungkantor | 12 | Item | 1.931.141.000 | 22 | 5.000.000 | - | - | - | - | 0 | 0 | 22 | 5.000.000 | 183,33 | 0,26 | SATPOL |

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----|---------------|-----|---------------|----|---------------|-----|-----|-----|----------------|--------|-------|--------|
| 6 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 1.108.592.000 | 100 | 268.042.467 | 100 | 219.872.000 | 98 | 216.068.437 | 98 | 98 | 198 | 484.110.904 | 198,27 | 43,67 | SATPOL |
| 1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah bulan pelayanan an jasa surat menyurat | 60 | bulan | 415.400.000 | 12 | 142.938.072 | 12 | 75.290.000 | 12 | 74.417.125 | 99 | 99 | 24 | 217.355.197 | 39,77 | 52,32 | SATPOL |
| 2 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pelayanan an jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | 60 | bulan | 252.300.000 | 12 | 66.132.371 | 12 | 36.000.000 | 11 | 34.342.262 | 95 | 95 | 23 | 100.474.633 | 39,08 | 39,82 | SATPOL |
| 3 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan pelayanan an jasa administrasi keuangan, Jumlah bulan pelayanan an jasa kebersihan | 60 | bulan | 440.892.000 | 12 | 58.972.024 | 12 | 108.582.000 | 12 | 107.309.050 | 99 | 99 | 24 | 166.281.074 | 39,77 | 37,71 | SATPOL |
| 7 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | % | 1.894.141.210 | 100 | 800.241.152 | 100 | 233.741.210 | 97 | 226.550.075 | 97 | 97 | 197 | 1.026.791.227 | 196,92 | 54,21 | SATPOL |
| 1 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah bulan pelayanan an Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60 | Bulan | 635.064.705 | 27 | 562.432.128 | 12 | 67.410.000 | 12 | 66.343.875 | 98 | 98 | 39 | 628.776.003 | 64,68 | 99,01 | SATPOL |
| 2 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 45 | Unit | 1.359.720.000 | 60 | 99.250.024 | 9 | 123.070.000 | 9 | 117.059.700 | 95 | 95 | 69 | 216.309.724 | 152,36 | 15,91 | SATPOL |
| 3 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 65 | Item | 205.394.000 | 37 | 61.704.000 | 13 | 25.000.000 | 13 | 24.944.500 | 100 | 100 | 50 | 86.648.500 | 76,88 | 42,19 | SATPOL |
| 4 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah luas gedung kantor yang dipelihara | 2.005 | M2 | 261.617.210 | 49 | 76.855.000 | 73 | 18.261.210 | 73 | 18.202.000 | 100 | 100 | 122 | 95.057.000 | 6,07 | 36,33 | SATPOL |
| II | Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 100 | % | 35.907.617.250 | 100 | 7.272.269.326 | 100 | 5.385.332.250 | 97 | 5.242.618.384 | 97 | 97 | 197 | 12.514.887.710 | 197,35 | 34,85 | SATPOL |
| 8 | | Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 100 | % | 11.114.752.450 | 100 | 2.909.229.230 | 100 | 1.052.280.000 | 98 | 1.033.917.170 | 98 | 98 | 198 | 3.943.146.400 | 198,25 | 35,48 | SATPOL |

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----|------|---------------|--------|-------|--------|
| 1 | | Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Gangguan Rawan Konflik, Jumlah Operasi Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Daerah, Jumlah Pencegahan Keamanan dan kenyamanan, Jumlah pengamanan Hari Besar Agama | 830 | objek kali kegiatan | 3.109.896.700 | 188 | 568.279.439 | 166 | 159.000.000 | 165 | 157.833.790 | 99 | 99 | 353 | 726.113.229 | 42,50 | 0,23 | SATPOL |
| 2 | | Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Operasional Penertiban dan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum, Jumlah Operasi Penertiban Pajak Daerah Non Yustisi | 620 | kali kali | 5.475.195.950 | 124 | 730.094.350 | 124 | 104.000.000 | 124 | 103.679.880 | 100 | 100 | 248 | 833.774.230 | 39,94 | 0,15 | SATPOL |
| 3 | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Jumlah anggota LINMAS kab. Bangka Tengah aktif berkoordinasi, Jumlah anggota linmas yang menerima asuransi, Jumlah anggota linmas yang menerima honor | 3096 | orang orang orang | 2.146.720.000 | 1.389 | 702.199.750 | 516 | 789.280.000 | 505 | 772.403.500 | 98 | 98 | 1894 | 1.474.603.250 | 61,17 | 0,00 | SATPOL |
| 4 | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | - Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelsiaga - Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 2410 | orang orang | 328.589.800 | 1.389 | 908.655.691 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1389 | 908.655.691 | 57,63 | 2,77 | SATPOL |
| 5 | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan POL PP (beladiri militer, Senam Tongkat T (Kundun), Penyuluhan Hukum) | 15 | lembaga | 54.350.000 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | SATPOL |
| 9 | Meningkatnya penerapan perda | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada | 100 | % | 24.697.864.800 | 100 | 4.343.040.496 | 100 | 4.318.052.250 | 97 | 4.193.851.148 | 97 | 97 | 197 | 8.536.891.644 | 197,12 | 34,57 | SATPOL |
| 1 | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Perda dan Perkadatersosialisasi dan pembinaan | 35 | Perda | 179.280.000 | 16 | 59.604.948 | 6 | 25.550.000 | 6 | 25.489.700 | 100 | 100 | 22 | 85.094.648 | 62,82 | 47,46 | SATPOL |

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---------------|--------|-------|--------|
| 2 | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | jumlah anggota Satpol PP yang menerima honor bulanan dan honor piket khusus bagi pegawai tidak tetap Anggota SATPOL PP Kab. Bangka Tengah Jumlah Kepatuhan masyarakat terhadap perda /perkada | 3816 | orang Perda | 19.978.065.000 | 154 | 4.244.415.698 | 636 | 4.250.102.250 | 617 | 4.126.063.357 | 97 | 97 | 771 | 8.370.479.055 | 20,22 | 41,90 | SATPOL |
| 3 | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Berkas P 21 (lengkap) Jumlah Operasional Penertiban Pajak Daerah Jumlah Penyelidikan yang terindikasi pelanggaran Perda dan Perkada | 206 | Sanki Kali kali | 315.967.550 | 24 | 39.019.850 | 35 | 42.400.000 | 35 | 42.298.091 | 100 | 100 | 59 | 81.317.941 | 28,60 | 25,74 | SATPOL |
| 10 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian PERDA/PERKADA | 100 | % | 95.000.000 | 100 | 19.999.600 | 100 | 15.000.000 | 99 | 14.850.066 | 99 | 99 | 199 | 34.849.666 | 199,00 | 36,68 | SATPOL |
| 1 | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Khusus dan Jumlah Rapat Koordinasi | 36 | Kali | 95.000.000 | 74 | 19.999.600 | 6 | 15.000.000 | 6 | 14.850.066 | 99 | 99 | 80 | 34.849.666 | 222,06 | 36,68 | SATPOL |
| III | Meningkatnya Penanggulangan kebakaran Secara Dini dan Komprehensif | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase pengendalian kebakaran | 82 | % | 19.989.667.578 | 50 | 822.511.534 | 82 | 1.083.081.578 | 77 | 1.018.358.398 | 94 | 94 | 127 | 1.840.869.932 | 155,00 | 9,21 | SATPOL |
| 11 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota | 100 | % | 19.904.667.578 | 100 | 822.511.534 | 100 | 1.023.081.578 | 96 | 979.044.598 | 96 | 96 | 196 | 1.801.556.132 | 195,70 | 9,05 | SATPOL |
| 1 | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi titik rawan kebakaran | 378 | Titik | 570.900.000 | 63 | 35.300.000 | 63 | 15.000.000 | 63 | 14.959.100 | 100 | 100 | 126 | 50.259.100 | 33,29 | 8,80 | SATPOL |
| 2 | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kendaraan inspeksi/operasional pemadam kebakaran yang dipelihara, Jumlah pegawai kontrak pemadam kebakaran | 702 | Unit Orang kali | 2.478.004.828 | 346 | 766.551.984 | 116 | 942.798.828 | 111 | 905.666.098 | 96 | 96 | 457 | 1.672.218.082 | 65,16 | 67,48 | SATPOL |

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----|------------|-----|------------|----|------------|-----|-----|----|------------|-------|-------|--------|
| | | | an | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi | 180 | Kejadian | 17.664.978.828 | 35 | 20.659.550 | 30 | 50.282.750 | 30 | 49.989.550 | 99 | 99 | 65 | 70.649.100 | 36,01 | 0,40 | SATPOL |
| 4 | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan operasi | 72 | Kejadian | 83.300.000 | - | 0 | 10 | 15.000.000 | 6 | 8.429.850 | 56 | 56 | 6 | 8.429.850 | 7,81 | 10,12 | SATPOL |
| 5 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Alat Pelindung Diri | Jumlah kegiatan operasi | 72 | Kejadian | 138.300.000 | - | 0 | 10 | 70.000.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | SATPOL |
| 12 | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Persentase pengendalian kebakaran | 100 | % | 30.000.000 | - | - | 100 | 30.000.000 | 97 | 29.224.100 | 97 | 97 | 97 | 29.224.100 | 97,41 | 97,41 | SATPOL |
| 1 | | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Terpeliharanya Alat Pemadam Api Ringan Proteksi Kebakaran | 120 | Badan Usaha/Instansi/Perusahaan | 15.000.000 | - | - | 20 | 15.000.000 | 20 | 14.949.850 | 100 | 100 | 20 | 14.949.850 | 16,61 | 99,67 | SATPOL |
| 2 | | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Alat Proteksi Kebakaran | 120 | Unit | 15.000.000 | - | - | 20 | 15.000.000 | 19 | 14.274.250 | 95 | 95 | 19 | 14.274.250 | 15,86 | 95,16 | SATPOL |
| 13 | | Investigasi Kejadian Kebakaran | Persentase pengendalian kebakaran | 100 | % | 15.000.000 | - | - | 100 | 15.000.000 | 17 | 2.600.000 | 17 | 17 | 17 | 2.600.000 | 17,33 | 17,33 | SATPOL |
| 1 | | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah frekuensi investigasi | 170 | Kali | 15.000.000 | - | - | 70 | 15.000.000 | 12 | 2.600.000 | 17 | 17 | 12 | 2.600.000 | 7,14 | 17,33 | SATPOL |
| 14 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Persentase pengendalian kebakaran | 100 | % | 40.000.000 | - | - | 100 | 15.000.000 | 50 | 7.489.700 | 50 | 50 | 50 | 7.489.700 | 49,93 | 18,72 | SATPOL |
| 1 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah frekuensi pelatihan/simulasi dan penyuluhan | 18 | Kali | 40.000.000 | - | - | 3 | 15.000.000 | 1 | 7.489.700 | 50 | 50 | 1 | 7.489.700 | 8,32 | 18,72 | SATPOL |

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditentukan NSPK dan SPM. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Berdasarkan data yang ada dapat kita ketahui berapa banyak terjadi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari – hari.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci masing-masing indikator utama menurut sasaran strategisnya, indikator kinerja program dan target pencapaian yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel berikut ini . (**Tabel II.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah s.d 2021**):

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka Tengah

| No. | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SPM | IKK | TARGET CAPAIAN TAHUN KE- | | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | | CATATAN ANALISIS |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | 2016 (n-2) | 2017 (n-1) | 2018 (thn n) | 2019 (thn n+1) | 2020 (thn n+1) | 2016 (thn n-2) | 2017 (thn n-1) | 2018 (Thn n) | 2019 (Thn n+1) | 2020 (Thn n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| 1 | Persentase Penurunan gangguan Ketertiban,ketentraman umum dan perlindungan Masyarakat | | | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 6,87 % | 6,56 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | |
| 2 | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada | | | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 6.38 % | 7.57 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % | |
| 3 | Tingkat waktu tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran | √ | | 75 % | 77 % | 80 % | 82 | 82 | n/a | 79.07 % | 80 % | 82 % | 82 % | |
| INDIKATOR KINERJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan) di Kabupaten / Kota | √ | | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 90,2 % | 99,12 % | 99,00 % | 99,00 % | 99,00 % | |
| 2 | Cakupan penegakan PERDA / PERKADA | √ | | 87% | 89% | 90% | 92% | 92% | 75,76 % | 90,16 % | 90,00 % | 92,00 % | 92,00 % | |
| 3 | Cakupan Patroli SATPOL PP | √ | - | Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamatan | Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamatan | Patroli 3kali sehari dalam satu kecamatan | Patroli 3kali sehari dalam satu kecamatan | Patroli 3kali sehari dalam satu kecamatan | Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamatan | Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamatan | Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamata n | Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamatan | Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamatan | |
| 4 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di kabupaten/Kota | √ | - | 0,61 linmas/RT | 0,68 linmas/RT | 0,75 linmas/RT | 0,82 linmas/RT | 0,82 linmas/RT | 0,61 linmas/RT | 0,61 linmas/RT | 0,61 linmas/R T | 0,82 linmas/RT | 0,82 linmas/RT | |
| 5 | Cakupan pelayanan kebakaran | √ | - | | 33 % | 33 % | 50 % | 50 % | | 27.89 % | 33 % | 50 % | 50 % | |

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan isu – isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan).

Identifikasi keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan tujuan, sasaran, dan strategi dan kebijakan yang akan diambil dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Analisis lingkungan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan tantangan sebagai berikut:

MATRIK ANALISIS KETERKAITAN ANTARA FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

| <div>INTERNAL</div> <div>EXTERNAL</div> | KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah; | 1. Belum optimalnya pembudayaan dan pembinaan disiplin dan loyalitas SDM Satuan PolisiPamong Praja dan Anggota Linmas; |
| | 2. Adanya sistem pembagian kerja yang baik dan manajemen operasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan lapangan ; | 2. kurang berkualitasnya SDM, banyaknya anggota Satpol PP dan anggota LINMAS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS, diklat Satpol PP dan diklat LINMAS; |
| | 3. Cepat tanggapnya sikap Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat | 3. Sarana dan prasarana kegiatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi mutu maupun jumlah; |
| | 4. Tidak adanya kesenjangan sosial antara pemimpin dan staf maupun anggota Polisi Pamong Praja | 4. Masih kurangnya komunikasi yang efektif antara Satpol PP dengan masyarakat; |
| | 5. Adanya komitmen aparaturnya untuk melaksanakan tugas dengan baik | 5. Adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi,kurangnya anggota SATPOL PP dan tidak adanya PPNS; |
| | | 6. Terbatasnya dana operasional dan pemberian reward yang kurang memadai. |
| | | 7. Peralatan penanggulangan bencana masih minim |
| PELUANG (O) | STRATEGI (S – O) | STRATEGI (W – O) |
| 1. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kebijakan nasional dalam mendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja; | 1. Meningkatkan profesionalisme Aparat Polisi Pamong Praja guna mendukung tugas-tugas teknis administratif, teknis yuridis dan teknis operasional | 1. Mengadakan sosialisasi PERDA maupun Kepala Daerah terhadap masyarakat secara intens dan berkala, |
| 2. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat serta semangat reformasi; | 2. Mengembangkan Program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat | 2. Meningkatkan kualitas SDM Polisi Pamong Praja dan anggota LINMAS melalui pembinaan, pendidikan maupun Bimbingan teknis lainnya . |
| 3. Semakin demokratisnya kehidupan masyarakat; | 3. Melakukan konsultasi kegiatan secara lebih intens dengan unsur pimpinan dalam mengoperasionalkan kegiatan | 3. Merekrut staff baru yang berkompeten untuk mengisi kekosongan jabatan |
| 4. Terjalannya hubungan dengan kepolisian, TNI, LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta komponen masyarakat lainnya; | 4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, aparat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam menciptakan suasana tertib,tentram, damai dan tegaknya supremasi perda serta tanggap terhadap terjadinya bencana. | 4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja, |
| 5. Tingginya kesadaran sikap dan komitmen masyarakat dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; | | 5. Mengusulkan tambahan anggaran biaya operasional, |
| 6. Besarnya keinginan masyarakat untuk hidup rukun, tertib, tentram, aman, dan damai. | | |
| 7. Indeks Resiko Bencana yang relatif rendah | | |
| TANTANGAN (T) | STRATEGI (S – T) | STRATEGI (W – T) |
| 1. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi (Pengaruh negatif dari globalisasi) ; | 1. Memberi pemahaman terhadap warga masyarakat dan membantu mencari solusi dalam penanggulangan tambang inkonvensional illegal dan penyakit masyarakat (PEKAT) seperi miras, prostitusi dan perjudian | 1. Peningkatan kualitas & profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dan LINMAS melalui Pendidikan & pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat & menekan terjadinya pelanggaran PERDA, |
| 2. Adanya tuntutan yang semakin meningkat terhadap kinerja Satpol PP di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan PERDA; | 2. Meningkatkan pelaksanaan operasional untuk mengembalikan fungsi peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah | 2. Peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja SATPOL PP |
| 3. Image negatif masyarakat terhadap Polisi Pamong Praja dan memandang rendah terhadap tugas LINMAS; | 3. Meningkatkan sosialisasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Penegak PERDA dan tugas anggota LINMAS, | 3. Meningkatkan Koordinasi,pendataan dan evaluasi untuk mendapatkan data tentang pelanggar PERDA |
| 4. Kurangnya dukungan lembaga sosial politik local dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan; | 4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi pemerintah dan non pemerintah sampai ke tingkat ke bawah. | 4. Mengadakan penambahan jumlah personil Polisi Pamong Praja, TIM Reaksi Cepat dan Tim Pemadam Kebakaran hingga mencapai jumlah memadai terhadap cakupan wilayah, |
| 5. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan tupoksi; | 5. Meningkatkan jalinan koordinasi aparat di tingkat lapangan | 5. Meningkatkan operasi-operasi penertiban. |
| 7. Perekonomian masyarakat yang lemah sehingga tingginya angka pengangguran | | |
| 8. Masyarakat tidak puas dengan dengan hasil PILKADA/kebijakan Pemerintah | | |
| 9. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah (Disaster awareness); | 6. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi situasi bencana. | |

Dari analisis di atas, Sejumlah isu – isu strategis prioritas yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun yang akan datang terkait dengan tantangan, masalah, dan beban pekerjaan yang akan ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

1. Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS, Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana dan Tim Damkar yang masih perlu ditingkatkan;
2. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap perda / perkara yang berlaku;
3. Maraknya peredaran minuman ilegal, reklame yang tidak sesuai peraturan yang berlaku ;
4. Kurangnya jumlah sumber daya anggota Satpol PP PNS, satlinmas, Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana dan Tim Damkar;
5. Kurangnya potensi satlinmas;
6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
7. Semakin meningkatnya potensi bencana sebagai akibat ancaman kerusakan lingkungan.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah pada TA 2023 akan melaksanakan Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan SATPOL PP pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 24 Sub kegiatan, adapun kegiatan tersebut antara lain :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

1.7 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1.7.1 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD

1.7.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, adapun kegiatan tersebut antara lain :

2.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

2.1.2 Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

2.1.3 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2.2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Bupati

2.2.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.2.2 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.2.3 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.3 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota

2.3.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, adapun kegiatan tersebut antara lain :

3.1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.3 Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

3.1.4 Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Kegiatan Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

3.2.1 Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

3.2.2 Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

3.3 Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran

3.3.1 Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

3.4 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

3.4.1 Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Adapun Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 untuk sumber dana APBD Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TENGAH

| NO | Urusan/BidangUrusanPemerintah Daerah dan Program, Kegiatan, Sub KegiatanPrioritas Daerah | INDIKATOR | PerubahanRencanaKerjaTahun 2023 | | | | | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Pagu APBD Induk 2023 | PaguIndikatifPerubahan 2023 | Bertambah / Berkurang | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | UrusanPemerintahanWajib Yang BerkaitanDenganPelayanan Dasar | | | | | | | |
| | BidangUrusanPemerintahanBidangKetentraman Dan KetertibanUmum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | 10.406.197.000 | 11.127.773.000 | 721.576.000 | |
| I.I | Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | NILAI SAKIP OPD | SatuanPolisiPamong Praja | 79 | 4.311.979.000 | 4.693.479.000 | 381.500.000 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentasecakupanpelayan anadministrasiumum | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 40.000.000 | 40.000.000 | - | |
| a | PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah | JumlahDokumenPerencanaa nPerangkat Daerah | Kabupaten Bangka Tengah | 5 Dokumen | 30.000.000 | 30.000.000 | - | |
| b | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | JumlahlaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Bangka Tengah | 5 Laporan | 10.000.000 | 10.000.000 | - | |
| 2 | AdministrasiKeuanganPerangkatDerah | PresentaseAdministrasiKeuangan | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 3.445.497.000 | 3.445.497.000 | - | |
| a | PenyediaGaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerimagaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Bangka Tengah | 32 Orang/bulan | 3.432.497.000 | 3.432.497.000 | - | |
| b | Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD | JumlahLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanLapora nKeuangan Akhir Tahun SKPD | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Laporan | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
| c | Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | JumlahLaporanKeuanganBulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasiPenyusuna nLaporanKeuanganBulanan/T riwulan/Semesteran SKPD | Kabupaten Bangka Tengah | 2 Laporan | 8.000.000 | 8.000.000 | - | |
| 3 | AdministrasiKepegawai anPerangkatdaerah | Presentasecakupanpelayan anadministrasikepegawaian perangkatdaerah | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 25.000.000 | 45.000.000 | 20.000.000 | |
| a | Pendidikan dan PelatihanPegawaiBerdas arkanTugas dan Fungsi | JumlahPegawaiBerdasarkanT ugas dan Fusngsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelaihan | Kabupaten Bangka Tengah | 5 orang | 25.000.000 | 25.000.000 | - | |
| b. | PengadaanpakaianDinasb esertaatributkelengkapanya | JumlahPaketPakaianDinasBe sertaAtributkelengkapanan | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Paket | - | 20.000.000 | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 4 | Administrasi Umum Perangkat daerah | Persentase cakupan pelayanan administrasi umum | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 172.200.000 | 174.200.000 | 2.000.000 | |
| a | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Kabupaten Bangka Tengah | 1 paket | 3.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |
| b | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Kabupaten Bangka Tengah | 1 paket | 18.000.000 | 18.000.000 | - | |
| c | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Paket | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| d | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Paket | 10.000.000 | 10.000.000 | - | |
| e | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Kabupaten Bangka Tengah | 4 Dokumen | 1.200.000 | 1.200.000 | - | |
| f | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kabupaten Bangka Tengah | 2 Laporan | 125.000.000 | 125.000.000 | - | |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 220.112.000 | 220.112.000 | - | - |
| a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Kabupaten Bangka Tengah | 12 Laporan | 75.290.000 | 75.290.000 | - | |
| b | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Kabupaten Bangka Tengah | 12 laporan | 36.000.000 | 36.000.000 | - | |
| c | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan | Kabupaten Bangka Tengah | 12 Laporan | 108.822.000 | 108.822.000 | - | |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | - | 322.000.000 | 322.000.000 | - |
| a | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Paket | - | 147.000.000 | 147.000.000 | |
| b | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang disediakan | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Paket | - | 175.000.000 | 175.000.000 | |
| 7 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | - | 17.500.000 | 17.500.000 | - |
| a. | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Laporan | - | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| b. | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Laporan | - | 7.500.000 | 7.500.000 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---|
| 8 | PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah | Persentasecakupanpengad aanbarangmilikdaerahpenu njangurusanpemerintahdae arh | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 409.170.000 | 429.170.000 | 20.000.000 | |
| a | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorang anDinasatauKendaraanDi nasJabatan | JumlahkendaraanPerorangan dinasataukendaraandinasjaba tan yang dipelihara dan bayarkanpajaknya | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Unit | 67.410.000 | 67.410.000 | - | |
| b | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraanDinas OperasionalatauLapanga n | Jumlahkendaraandinasoperas ionalataulapangan yang dipelihara dan dibayarkanpajak dan perizinanya | Kabupaten Bangka Tengah | 7 Unit | 311.760.000 | 311.760.000 | - | |
| c | PemeliharaanPeralatanm esinLainnya | Jumlahperalatan dan mesinlainnya yang dipelihara | Kabupaten Bangka Tengah | 13 Item | 20.000.000 | 20.000.000 | - | |
| d | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya | Jumlahgedungkantor dan bangunanlainnya yang dipelihara /direhabilitasi | Kabupaten Bangka Tengah | 1 Unit | 10.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | |
| I.2 | Program Peningkatanketentrama n dan KetertibanUmum | PersentaseGangguanTranti bum yang dapatdiselesaikan | SatuanPoli siPamong Praja | 100% | 5.144.332.000 | 5.482.408.000 | 338.076.00 0 | - |
| 9 | PenangananGangguanKetertiban dan KetertibanUmumdalam 1 Daerah Kabupaten / Kota | JumlahGangguan Rawan Konflik, JumlahOperasiPengamana n dan PengawalanPejabat Daerah, JumlahPencegahanKeaman an dan Jumlahkenyamanan | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 969.280.000 | 1.078.156.000 | 108.876.00 0 | - |
| a | PencegahanGangguanKetenteraman dan KetertibanUmummelaluiD eteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, PelaksanaanPatroli, Pengamanan, dan Pengawalan | JumlahKasusGanguanketent raman dan ketertibanumum yang dicegahmelaluideteksidini dan cegahdini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaanpatroli, pengamanan dan pengawalan | Kabupaten Bangka Tengah | 122 kasus | 90.000.000 | 120.000.000 | 30.000.000 | |
| b | PenindakanatasGangua nKetenteraman dan KetertibanUmumBerdasar kanPerda dan PerkadamelaluiPenertiban dan PenangananUnjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlahkasusgangguamketent raman dan ketertibanumberdasarkanp erda dan perkadamelaluipenertiban dan penangananunjuk rasa dan kerusuhanmassa yang dilakukanpenindakan | Kabupaten Bangka Tengah | 60 kasus | 90.000.000 | 90.000.000 | - | |
| c | PemberdayaanPerlindung an Masyarakat dalamrangkaKetentraman dan KetertibanUmum | Jumlahdokumen yang memuathasilpemberayaanper lindunganmasyarakatdalamra ngkaketentraman dan ketertibanumum | Kabupaten Bangka Tengah | 4 Dokumen | 789.280.000 | 868.156.000 | 78.876.000 | |
| 10 | PenegakanPeraturan Daerah Kabupaten / Kota dan PeraturanBupati / wakil Bupati | PersentasePerdaPerkada yang di tegakkan | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 4.160.052.000 | 4.389.252.000 | 229.200.00 0 | - |
| a | SosialisasiPenegakanPer aturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota | Jumlahlaporanhasilpelaksana ansosialisasipenegakanperda /perkadakepadamasyarakat/k elompokmasyarakat/pelakuus aha | Kabupaten Bangka Tengah | 6 laporan | 25.550.000 | 25.550.000 | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---|
| b | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan bupati/walikota | Kabupaten Bangka Tengah | 5 Laporan | 4.092.102.000 | 4.321.302.000 | 229.200.000 | |
| c | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP | Kabupaten Bangka Tengah | 5 Laporan | 42.400.000 | 42.400.000 | - | |
| 11 | PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL (PPNS) | Persentase Perda Perkada yang ditegakkan | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| a | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada | Kabupaten Bangka Tengah | 4 Laporan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| I.3 | Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Presentase Pengendalian Kebakaran | Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 949.886.000 | 951.886.000 | 2.000.000 | - |
| 12 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Pengendalian Kebakaran, Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 889.886.000 | 891.886.000 | 2.000.000 | |
| a | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya | Kabupaten Bangka Tengah | 4 Dokumen | 32.566.000 | 32.566.000 | - | |
| b | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten/kota | Kabupaten Bangka Tengah | 4 Laporan | 777.320.000 | 779.320.000 | 2.000.000 | |
| c | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan/evakuasi saat penanganan kebakaran dan non kebakaran | Kabupaten Bangka Tengah | 2 Dokumen | 65.000.000 | 65.000.000 | - | |
| d | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengenalan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota | Kabupaten Bangka Tengah | 4 Dokumen | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| 13 | Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Presentase Pengendalian Kebakaran, Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 30.000.000 | 30.000.000 | - | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|------------|---|--|
| a | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran | Kabupaten Bangka Tengah | 20 Pelaku Usaha | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| b | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kriteria standar sarana prasarana proteksi kebakaran | Kabupaten Bangka Tengah | 20 Unit | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| 14 | Investigasi Kejadian Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota, Tingkat Waktu Tanggap Respon Rate Time wilayah Kebakaran | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| a. | Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian dan penelitian | Kabupaten Bangka Tengah | 4 Dokumen | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota, Tingkat Waktu Tanggap Respon Rate Time wilayah Kebakaran | Kabupaten Bangka Tengah | 100% | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |
| a. | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbinar elawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya | Kabupaten Bangka Tengah | 6 Desa/Kelurahan | 15.000.000 | 15.000.000 | - | |

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai dengan yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib bagi setiap daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa keberadaan Satpol PP merupakan suatu lembaga yang harus ada dan mandiri, serta dibutuhkan dalam tatanan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten.

Begitu pula dengan Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki fungsi dan tugas sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Dalam hal melaksanakan tugasnya Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah harus memiliki rencana strategis (Renstra) periode 2021-2026 yang dibuat sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kepala Daerah di bidang ketertiban dan ketentraman berdasarkan skala prioritas yang pelaksanaannya berkesinambungan sehingga dapat menciptakan kondisi kehidupan yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

Sasaran yang ingin ditempuh dalam penyusunan Renstra ini adalah Tercapainya ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah adalah terciptanya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, terlaksananya pengawasan terhadap disiplin kinerja pegawai, serta terkoordinirnya pengawasan serta pengamanan kantor, rumah kepala daerah, serta rumah pejabat lainnya, terciptanya hubungan yang baik dengan instansi-instansi lain dalam menciptakan kondisi yang kondusif, dan terlaksananya pelayanan pengamanan dan pengawasan yang baik.

Sedangkan Indikatornya adalah jumlah Tambang Inkonvensional Ilegal, jumlah penyakit masyarakat (pekat) seperti miras, judi, pelacuran, dan lain-lain, jumlah izin usaha yang ilegal seperti walet, reklame, maupun IMB, dan lain-lain,

jumlah Pegawai berada diluar jam kerja, jumlah anak sekolah yang berkeliaran pada jam sekolah, jumlah laporan dari masyarakat, jumlah pedagang kaki lima yang melanggar Perda, Indeks kriminalitas dan rasio penyelesaian kasus kriminalitas, jumlah Perda dan Keputusan Kepala Daerah, dan jumlah pengamanan di Lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah.

Sehingga pada akhirnya penyusunan Renstra ini sangatlah penting, karena dengan adanya Renstra ini, kita dapat mengukur kemampuan dan kualitas daerah Kabupaten Bangka Tengah.

4.2. Saran

Adapun saran dalam melaksanakan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Diharapkan agar adanya kerjasama yang intens dan berkelanjutan antara Satpol PP dengan maupun dinas-dinas lainnya, baik dinas di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah maupun yang diluarnya.
2. Diharapkan masyarakat Bangka Tengah dapat bekerjasama dengan Satpol PP dalam hal penegakan ketertiban dan keamanan.
3. Diharapkan adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan kinerja Satpol PP.

KOBA, Juli 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



Srs. IRWAN, M.Tr.I.P
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19681128 198810 1 001